

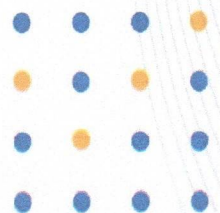
**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)  
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**Jalan Sultan Hadiwijaya No.4 Telp 0291-685790**

**DEMAK**





## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023. LKj Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Istansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKj Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan dan atau belum tercapaiannya sasaran saat ini berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Demak, 3 Januari 2024

KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN DEMAK



**Dra. ENDAH CAHYARINI, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19680903 199302 2 001

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	1
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	2
<b>DAFTAR ISI</b> .....	3
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1. Gambaran Umum Organisasi dan Jabatan.....	4
1.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika .....	13
1.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.....	16
1.4. Aspek Strategis dan Permasalahan yang Dihadapi .....	18
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1. Rencana Strategis .....	21
2.2. Tujuan dan Sasaran .....	23
2.3. Strategi dan Kebijakan .....	24
2.4. Indikator kinerja Kunci .....	25
2.5. Perjanjian Kinerja .....	26
2.6. Program dan Kegiatan .....	28
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023</b>	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	33
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.....	35
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	36
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi .....	37
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional .....	38
5. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.....	42
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	45
7. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	49
8. Realisasi Anggaran.....	64
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan .....	71
4.2. Saran.....	72

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Organisasi dan Jabatan**

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak merupakan salah satu Dinas di Kabupaten Demak pelaksana urusan wajib non pelayanan dasar dengan tipe C yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan hasil evaluasi Bagian Organisasi pada tahun 2021 naik menjadi tipe B yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

#### **1. Susunan Organisasi dan Jabatan**

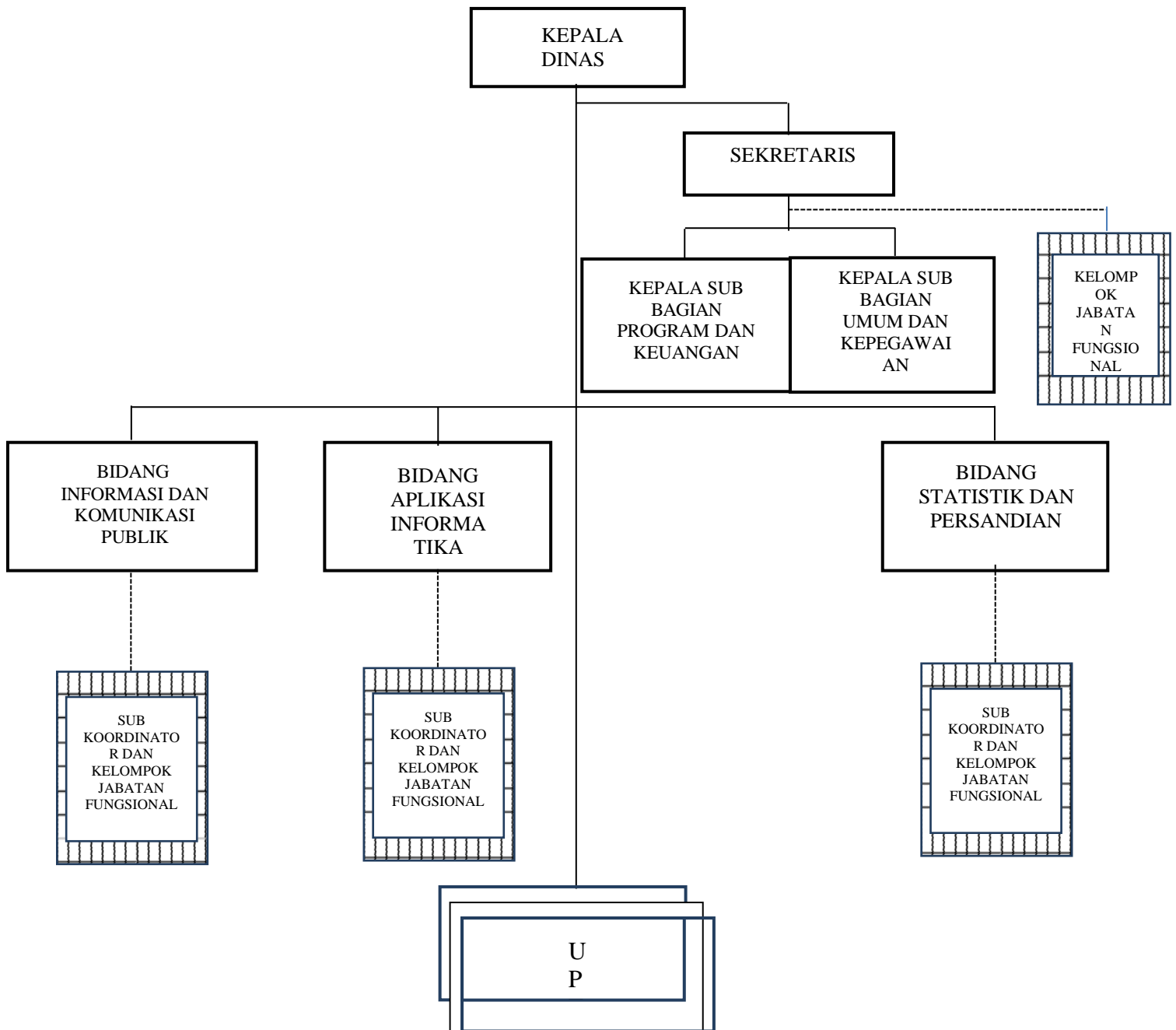
Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, yang membawahi:
  - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan.
  - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri atas:
  - 1) Sub Koordinator Pengelolaan Informasi Daerah (PID),.
  - 2) Sub Koordinator Kehumasan.
  - 3) Sub Koordinator Media Komunikasi Publik.
- c. Bidang Aplikasi Informatika:
  - 1) Sub Koordinator Sistem dan Program Aplikasi.
  - 2) Sub Koordinator Pengembangan Ekosistem dan Tata Kelola E-Government.
  - 3) Sub Koordinator Infrastruktur Jaringan.
- d. Bidang Statistik dan Persandian
  - 1) Sub Koordinator Pengelolaan Data Statistik.
  - 2) Sub Koordinator Persandian

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



## 2. Tugas dan Fungsi OPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2), telah dikeluarkan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak,

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak mempunyai tugas dan fungsi **“Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian yang menjadi kewenangan Daerah”**.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Aplikasi Informatika serta Statistik dan Persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Aplikasi Informatika serta Statistik dan Persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Aplikasi Informatika serta Statistik dan Persandian;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

## 3. Uraian Tugas

Sesuai Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak, adalah sebagai berikut :

### a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian yang menjadi kewenangan Daerah.



## **b. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas,

Sekretariat dalam menjalankan tugas pokok mempunyai fungsi:

- 1) penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- 2) penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- 3) penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Dinas;
- 4) penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- 5) penyiapan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- 6) penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- 7) penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

a. Subag Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas :

- 1) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Program dan Keuangan;
- 2) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang program dan keuangan;
- 3) menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang program dan keuangan;
- 4) menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan program dan keuangan di lingkungan Dinas;
- 5) menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan keuangan di lingkungan Dinas;

- 6) menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program dan keuangan;
  - 7) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang program dan keuangan; dan
  - 8) melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas
- 1) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
  - 3) menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
  - 4) menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
  - 5) menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
  - 6) menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
  - 7) menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
  - 8) menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
  - 9) menyiapkan bahan pengelolaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
  - 10) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
  - 11) melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Informasi Daerah (PID), Kehumasan, dan Media Komunikasi Publik., dalam menjalankan tugasnya Bidang Informasi dan Komunikasi Publik melaksanakan fungsi :



- 1) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Informasi Daerah (PID);
- 2) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kehumasan;
- 3) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Media Komunikasi Publik; dan
- 4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dibantu oleh 3 Sub Koordinator, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

1. Sub Koordinator Pengelolaan Informasi Daerah (PID), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi daerah, meliputi:
  - a melaksanakan monitoring opini dan aspirasi publik;
  - b melaksanakan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah;
  - c melaksanakan penguatan tata kelola komisi informasi di daerah; dan
  - d melaksanakan pelayanan informasi public.
2. Sub Koordinator Kehumasan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kehumasan, meliputi:
  - a melaksanakan kemitraan dengan pemangku kepentingan;
  - b melaksanakan manajemen komunikasi krisis; dan
  - c menyelenggarakan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas.
3. Sub Koordinator Media Komunikasi Publik, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang media komunikasi public, meliputi:
  - a merumuskan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;
  - b mengelola konten dan perencanaan media komunikasi publik;
  - c mengelola media komunikasi publik;
  - d melaksanakan layanan hubungan media;
  - e melaksanakan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik; dan

- f melaksanakan penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten.

**d. Bidang Aplikasi Informatika**

Bidang Aplikasi Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Sistem dan Program Aplikasi, Pengembangan Ekosistem dan Tata Kelola E- Government, serta Infrastruktur Jaringan., dalam menjalankan tugasnya Bidang Informasi dan Komunikasi Publik melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Sistem dan Program Aplikasi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Ekosistem dan Tata Kelola *E- Government*;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Infrastruktur Jaringan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bidang Aplikasi Informatika dan dibantu dibantu oleh 3 Sub Koordinator, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Sub Koordinator Sistem dan Program Aplikasi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem dan program aplikasi, meliputi:
  - a. melaksanakan pendaftaran nama domain pemerintah kabupaten;
  - b. melaksanakan penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten;
  - c. mengembangkan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
  - d. menyelenggarakan sistem penghubung layanan pemerintah; dan
  - e. mengembangkan dan mengelola sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah.

- b. Sub Koordinator Pengembangan Ekosistem dan Tata Kelola *E-Government*, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan ekosistem dan tata kelola *e-government*, meliputi:
  - a melaksanakan penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten;
  - b melaksanakan sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik;
  - c mengembangkan dan mengelola ekosistem kabupaten cerdas dan kota cerdas;
  - d mengelola Government Chief Information Officer (GCIO); dan
  - e melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE.
3. Sub Koordinator Infrastruktur Jaringan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur jaringan, meliputi:
  - a. menyelenggarakan sistem jaringan intra pemerintah daerah;
  - b. mengelola pusat data / data centre (DC) pemerintahan daerah;
  - c. mengelola network operating control (NOC);
  - d. menyelenggarakan sistem komunikasi intra pemerintah daerah; dan
  - e. menyelenggarakan dan mengelola sistem pemantauan CCTV.

**e. Bidang Statistik dan Persandian**

Bidang Statistik dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Persandian, dalam menjalankan tugasnya Bidang Statistik dan Persandian melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Data Statistik;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Persandian; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kepala Bidang Statistik dan Persandian dibantu oleh Sub Koordinator, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

1. Sub Koordinator Pengelolaan Data Statistik, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan data statistik, meliputi:
  - a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral;
  - b. meningkatkan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi;
  - c. membangun metadata statistik sektoral;
  - d. meningkatkan kapasitas kelembagaan statistik sektoral;
  - e. mengembangkan satu data Demak;
  - f. menyelenggarakan otorisasi statistik sektoral di daerah; dan
  - g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik.
2. Sub Koordinator Persandian, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang persandian, meliputi:
  - a. menetapkan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaringan komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten;
  - b. melaksanakan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten;
  - c. melaksanakan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten berbasis elektronik dan non elektronik;
  - d. menyediakan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten;
  - e. melaksanakan operasionalisasi jaringan komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten; dan
  - f. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi.Selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Sub Koordinator juga melaksanakan tugas:
  - a. menyiapkan bahan rencana kerja serta anggaran sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup



- tugas dan fungsinya;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
  - d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
  - e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sesuai bidang tugas dan fungsinya;
  - f. melakukan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan tugas pejabat fungsional atau pelaksana sesuai bidang tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

## 1.2 SUMBER DAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak di dukung oleh sumber daya manusia dan sarana dan prasarana per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

### 1. Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak sampai dengan 31 Desember 2023 tercatat sebanyak 28 orang. Keadaan pegawai berdasarkan Golongan, Eselon, Pendidikan, Diklat Struktural, Pangkat dan Golongan dan Tenaga Honorer adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**SDM menurut Golongan**

NO	UNIT / BIDANG	GOL I		GOL II		GOL III		GOL IV		JUMLAH ORANG		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
2.	Sekretariat	-	-	1	-	-	2	1	1	2	3	5
3	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	-	-	-	-	1	6	1	-	2	6	8
4.	Bidang Aplikasi Informatika	-	-	-	-	8	1	1	-	9	1	10
5.	Bidang Statistik dan Persandian	-	-	2	-	1	1	-	-	3	1	4
<b>Jumlah Karyawan</b>		-	-	<b>3</b>	-	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>28</b>

**Tabel 1.2**  
**SDM menurut Eselon**

NO	ESELON	JUMLAH		
		L	P	Jumlah
1.	Eselon II b	-	1	1
2.	Eselon IIIa	1	-	1
3.	Eselon IIIb	2	-	2
4.	Eselon IV a	-	1	1
5	Subkoor	4	3	7
	<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>

**Tabel 1.3**  
**SDM menurut Pendidikan Formal**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	L	P	JUMLAH
1.	Pasca Sarjana (S2)	5	3	8
2.	Sarjana S1	7	8	15
3.	Sarjana Muda (D2 dan D3)	1	1	2
4.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	3	-	3
5.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	-	-	-
6.	Sekolah Dasar (SD)	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>28</b>

**Tabel 1.4**  
**SDM yang telah mengikuti diklat structural**

NO	JENJANG STRUKTURAL	JUMLAH
1.	Spamen/Pim II	-
2.	Diklat Pim Tk III	4
3.	Diklat Pim Tk IV	7
	<b>Jumlah</b>	<b>11</b>

**Tabel 1.5**  
**SDM menurut Pangkat/Golongan**

No	Dinas Komunikasi dan Informatika Jabatan dan Eselon	Nama	Keterangan			
			Kualifikasi Pend.	Pangkat Gol.	Pejabat Struktural (V)	Pejabat Fungsional / umum (V)
1	Kepala Dinas II.b	Dra. ENDAH CAHYARINI,MM	S2	IV/c	V	
2	Sekretaris dinas III.a	INDRIJANTORO WIDODO, SE.MM	S2	IV /b	V	
3	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik III.b	AGUS PRAMONO, SH, MH	S2	IV/a	V	
4	Kabid Bidang Aplikasi Informatika III.b	HARSO GUTOMO, ST	S2	IV /a	V	
5	Kabid Statistik dan Persandian	--				
6	Kasubbag Prog Keu IV.a	MIARSIH, S.PD, MT	S2	IV /a	V	
7	Kasubbag Umpeg IV.a	--				
8	Sub Koordinator Pengelolaan Informasi Daerah (PID),	SARI ARDIYANI, SE	S1	III /d		V

No	Dinas Komunikasi dan Informatika Jabatan dan Eselon	Nama	Keterangan			
			Kualifikasi Pend.	Pangkat Gol.	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional / umum
					(V)	(V)
9	Sub Koordinator Kehumasan	DESY RAHMAWATI, S.Sos	S1	III /d		V
10	Sub Koordinator Media Komunikasi Publik	RUDYANTO, S.Sos	S1	III /d		V
11	Sub Koordinator Persandian	NUR KUSAENI, S. Kom	S1	III /c		V
12	Sub Koordinator Sistem dan Program Aplikasi	ANDY KURNIAWAN, S.KOM	S2	III /d		V
13	Sub Koordinator Pengembangan Ekosistem dan Tata Kelola E-Government	BIMO AJAR SUMAWONO, ST	S2	III /d		V
14	Sub Koordinator Infrastruktur Jaringan	PUJI MULYANI, S.Kom	S1	III /b		V
15	Pranata Komputer	BAGUS TRI HANGGORO, S.Kom	S1	III/a		V
16	Pranata Komputer	RENY RYANA, S.Kom	S1	III /a		V
17	Calon Pranata Komputer Ahli Pertama	HELEN HARDIANA, ST	S1	III /a		V
18	Analisis Sistem dan Jaringan	FAJAR AJI NUGROHO, S. Kom	S1	III /a		V
19	Calon Pranata Komputer Ahli Pertama	MAULIDA SEPTIANING ANGGITA, S.Kom	S1	III /a		V
20	Calon Pranata Komputer Ahli Pertama	ENDAH EKASANTI SAPUTRI, ST	S1	III /a		V
21	Pengawas Telekomunikasi	HANIEF PANGGIARSO, S,Kom	S1	III /a		V
22	Pranata Humas	ISTI IRNAWATI. S.I. Kom	S1	9		V
23	Pranata Humas	SURAYA FIRNADA. S.I.Kom	S1	9		V
24	Pranata Humas	M.ABDUH IBNU SAID, S.Kom	S1	9		V
25	Pranata Humas	ADITYA YODA SAPUTRA S.Kom	S1	9		V
26	Pelaksana	MOCH KHOLIQUIN, A.MD	D3	III /a		V
27	Pelaksana	CHOTIMATUS SA'ADAH, A.md. Kom	D3	II /d		V
28	Pelaksana	KARIRI	SLTA	II /d		V
29	Pelaksana	ENI MUHADI	SLTA	II /d		V
30	Pelaksana	RAKANI	SLTA	II /c		V
<b>JUMLAH</b>					<b>5</b>	<b>22</b>

**Tabel 1.6**  
**Tenaga Honorer / kontrak Bulanan Dinkominfo Kabupaten Demak**

NO	NAMA	PEND.	STAF BIDANG	KET.
1	Suharni, SH	S1	Staf Bidang Komtik	
2	Merpati Fanitasari, ST	S1	Staf Bidang Komtik	
3	Heru Sulistiono, S.Pd	S1	Staf Sekretariat	
4	Nadia Sikha Muji Wulan Sari, S.Kom	S1	Staf Bidang Insan	
5	Ftria Utami Ningsih, SE	S1	Staf Sekertariat	

NO	NAMA	PEND.	STAF BIDANG	KET.
6	Ahmad Nahrowi, SM	S1	Staf Bidang Insan	
7	Ardiani Anindiasari, SE	S1	Staf Sekretariat	
8	Baharudin Ardiansyah, S,Ds	S1	Staf Bidang Komtik	
9	Shela Farach Diba, S. Stat	S1	Staf Bidang Statistik dan persandian	
10	Suwandi	SLTA	Staf Staf Bidang Komtik	
11	Mustofa	SLTA	Staf Bidang Komtik	
12	Adi Ragil Prayogo	SLTA	Staf Sekretariat	

### 1.3 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD

Sesuai Renstra dan RPJMD yang telah tersusun tahun 2021-2026, seiring dengan program yang sudah berjalan lima tahun yang lalu, perlu adanya evaluasi kelemahan atau kekurangan dalam mencapai target indikator keberhasilan pembangunan dibidang Komunikasi dan Informatika. Evaluasi yang dilakukan adalah untuk menghadapi tantangan dan peluang kedepan agar lebih terprogram, terarah, sistematik, sesuai tujuan dan sasaran.

Untuk mengoptimalkan capaian kinerja, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak masih harus menghadapi tantangan dan peluang yang ada di masa mendatang antara lain :

#### 1.3.1. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak sebagai berikut :

- a. Regulasi tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) masih baru. Pemerintah Kabupaten Demak baru menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, diperlukan banyak regulasi turunan untuk implementasinya.
- b. Demak Smart City merupakan tantangan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkannya. Memerlukan infrastruktur teknologi informasi dan pendukungnya, selain juga dibutuhkan literasi digital bagi penduduknya. Kota Pintar adalah impian banyak kota/ kabupaten di Indonesia. Pelayanan yang mudah, cepat, murah dan terjamin kualitasnya merupakan wujud kota pintar
- c. Jaringan intranet dan internet di lingkungan Pemkab Demak yang belum menjangkau ke seluruh wilayah/pusat pemerintahan, juga tantangan. Investasi akan infrastruktur teknologi informatika memerlukan biaya besar.



- d. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan sumberdaya teknologi informasi, sistem keamanan informasi sangat dibutuhkan untuk menjamin keutuhan data. Standar Internasional diperlukan, sumberdaya manusia juga dibutuhkan.
- e. Tuntutan keterbukaan informasi dalam menjalankan pemerintahan merupakan tantangan lain dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Sebagai pengelola data dan informasi dibutuhkan ketelitian dan kecerdasan diplomasi dalam mengelola data dan informasi.
- f. Tantangan lain adalah tentang data. Banyak sumber data namun kadang berbeda, untuk itu diperlukan regulasi tentang Satu Data Demak yang terintegrasi melalui Single Data System;
- g. Informasi sangat dibutuhkan dan merupakan hak masyarakat, untuk itu tantangan dalam publikasi pembangunan daerah sangat diperlukan secara masif melalui berbagai kanal media.

#### 1.3.2. Peluang

Peluang bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) didasari Perpres nomor 95 tahun 2018 sehingga peluang memanfaatkan aplikasi umum dan berbagi pakai terbuka luas misalnya SIMANTRA sebagai sistem penghubung layanan SPBE di Pemerintah Kabupaten Demak.
- b. Peraturan Bupati Demak tentang Masterplan Demak Smart City tahun 2019-2029 yang telah disusun pada tahun 2019, sebagai landasan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Demak.
- c. Ketersediaan jaringan intranet dan internet hingga wilayah terjauh/terpencil sebagai modal utama dalam pengembangan teknologi informasi hingga ke pelosok wilayah.
- d. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) selalu mendorong dan memberikan fasilitas dalam peningkatan keamanan informasi;
- e. Situs demakkab.go.id, Media sosial : facebook, twitter, whatsapp, Instagram, youtube sebagai media digital mempercepat penyebaran informasi pembangunan didukung oleh media radio suara kota wali, dan media luar ruang seperti : baliho, banner, MMT, stiker;
- f. Kebijakan Satu data Indonesia memberikan peluang Satu data demak terintegrasi.

- g. Undang undang nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik memberi peluang keterbukaan dalam mengelola informasi pemerintah daerah yang merupakan hak masyarakat.

#### 1.3.3 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

Bahwa kondisi sumber daya aparatur saat ini sangat membutuhkan spesifikasi yang sesuai dengan urusan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak. Sebagai dinas teknis, Dinkominfo membutuhkan SDM yang mempunyai kompetensi dibidang Teknologi Informasi, bidang Komunikasi, bidang persandian dan keamanan informasi dan bidang statistik.

Sumber daya manusia ini sangat penting bagi Dinas Komunikasi dan Informatika, karena tugas berat untuk mewujudkan Demak Smart City membutuhkan tenaga yang handal dan berdedikasi tinggi. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, baik dengan cara penambahan pegawai pada formasi CPNS maupun melalui pendidikan dan pelatihan, kaji banding dan lain-lain.

#### 1.3.4. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak, didukung dengan sarana dan prasarana kantor yang tentunya harus mengikuti perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mampu menjawab tantangan 10 sampai 15 tahun mendatang. Untuk saat ini kita sudah mampu melaksanakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), hasil evaluasi saat ini dengan angka Indeks SPBE 3,19 urutan ketiga tingkat Jawa Tengah dan Nasional. Sebuah modal yang sangat berharga untuk menjawab tantangan kedepan dan peluang kita adalah para pimpinan daerah memberikan anggaran yang memadai serta dukungan dari semua komponen di Pemerintahan Kabupaten Demak untuk pengembangan pelaksanaan SPBE dimasa yang akan datang.

### 1.4 ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Permasalahan dalam perubahan renja 2023 Dinas Komunikasi Dan Informatika sesuai Tugas, pokok dan fungsi di Bidang urusan Komunikasi dan Informasi, urusan statistic dan urusan persandian

antara lain :

- a) Kualitas SDM yang masih terbatas dalam ilmu pengetahuan dan tehnologi di bidang Komunikasi dan Informasi

- b) Anggaran yang terbatas dalam peningkatan sarana dan prasarana pendukung komunikasi dan informasi dan dinamisnya perkembangan IT
- c) Masih adanya beberapa wilayah di Kabupaten Demak yang tidak terjangkau sinyal Komunikasi (Blank spot)
- d) Sarana dan Prasarana hardware yang kurang mendukung dalam pengoperasian server resmi Pemerintah Kabupaten Demak .
- e) Penyerahan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Single Data System (SDS) belum sepenuhnya dilakukan secara rutin oleh semua badan public
- f) Regulasi tentang PPID pemerintahan Kabupaten Demak belum lengkap (tentang informasi yang dikecualikan belum ada)

Dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, sebagai berikut :

1. Masih ditemukan celah kerawanan pada sistem elektronik yang mengganggu kinerja dari sistem elektronik tersebut. CSIRT Demakkab belum berjalan secara maksimal karena SDM Keamanan siber belum ada, selain itu sarana prasarana keamanan informasi belum memadai, belum adanya *firewall* untuk website;
2. Pengelola aplikasi SIDAK masih kesulitan saat menampilkan dokumen yang telah di TTE untuk diverifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut;
3. Rendahnya traffic penggunaan SPLP, karena kurangnya akses pemakaian;
4. Permasalahan Tata Kelola TIK yang masih kurang optimal juga terjadi di pemerintah Kabupaten Demak. Saat ini infrastruktur jaringan internet dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, masih berupa akses point dan baru sedikit dihubungkan dengan jaringan fiber optik yaitu sekitar 7 km belum mencakup seluruh OPD;
5. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak sudah memiliki ruang server yang digunakan untuk melayani akses server aplikasi dan data, namun belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, karena masih ada OPD masih mengelola data dan aplikasinya di masing-masing server yang dimiliki;
6. SPBE belum diterapkan pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik secara menyeluruh dan optimal. Penerapan SPBE seharusnya memiliki pengaruh yang kuat terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, masih terdapat permasalahan kinerja pada pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas kinerja, persepsi korupsi, dan pelayanan publik;
7. Jangkauan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah dan ke semua lapisan masyarakat yang belum optimal. Infrastruktur TIK khususnya jaringan telekomunikasi

merupakan fondasi konektivitas antara penyelenggara SPBE dengan pengguna. Tingkat efektivitas SPBE sangat bergantung pada tingkat aksesibilitas pengguna terhadap Layanan SPBE melalui jaringan telekomunikasi;

8. Keterbatasan jumlah pegawai ASN yang memiliki kompetensi teknis TIK. Perkembangan TIK menuntut perluasan dan pendalaman kompetensi teknis yang memadai terkhusus SDM pada Bidang Keamanan Informasi;
9. Masih seringnya beberapa aplikasi yang terserang ransomware;
10. Terjadi kendala server cloud down, sehingga mengakibatkan layanan aplikasi di seluruh perangkat daerah terhenti;
11. Sistem Informasi yang dibangun OPD masih bersifat parsial;
12. Masih ada beberapa OPD yang belum sepenuhnya memahami dan mengerti mengenai smartcity dan renaksi yang perlu disiapkan untuk evaluasi smartcity tahun 2023;
13. Pemeliharaan jaringan belum menyeluruh;
14. Ada beberapa OPD yang belum mengisi metadata di aplikasi OMAE;
15. Terganggunya komunikasi data dikarenakan kerusakan peralatan atau dikarenakan kendala lain;
16. Masih terbatasnya upaya diseminasi informasi mengenai kebijakan dan hasil pembangunan daerah baik melalui website pemerintah kabupaten, media massa lokal maupun nasional;
17. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap UU cukai dan masih banyaknya pelanggaran peredaran rokok ilegal;
18. Sosialisasi belum bisa dilakukan kepada seluruh kecamatan se-Kabupaten Demak dikarenakan keterbatasan waktu pengumpulan warga desa se-kecamatan (mengikuti jadwal dari kecamatan);
19. Masih banyak potensi usaha dan kesenian di desa yang belum terwadahi optimal;
20. Banyak masyarakat yang masih takut untuk melaporkan terkait masalah pelayanan publik di Kabupaten Demak;
21. Konten website PPID Desa belum terpenuhi;
22. Admin OPD masih kesulitan mendapat data sektoral dan belum tepat waktu dalam pengumpulan data prioritas dan metadata.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 RENCANA STRATEGIS**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 5 (lima) tahun.

Sebagai suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu lima tahun, penyusunan Renstra harus memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh Aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2021 sampai dengan 2026.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 dibuat berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2021–2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026

##### **2.1.1 Visi**

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 tahun. Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Demak selama lima tahun (2021-2026) sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu :

***“Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera”***

Visi tersebut diatas terdiri dari 3 frase (bagian) yaitu Kabupaten Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Kabupaten Demak yang Bermartabat**, martabat merupakan hak seseorang untuk dihargai dan dihormati dan diperlakukan secara etis. Martabat merupakan konsep yang penting dalam bidang moralitas, etika, hukum dan politik. Bermartabat dimaknai sebagai sikap yang berwibawa yang harus

dimiliki dalam menjalankan reformasi birokrasi.

**Kabupaten Demak yang Maju**, Maju dapat menyatakan suatu tindakan keberadaan, dan pengalaman. Maju dimaknai dengan berada pada tingkat peradaban yang tinggi, yang dimaksud adalah para manusia. Hal ini dimaksudkan bahwa sumber daya manusia telah berkembang pikirannya.

**Kabupaten Demak yang Sejahtera**, Sejahtera merupakan sebuah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang dapat memenuhi standar kehidupan yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kabupaten Demak yang semakin membaik terutama pada sektor ekonomi.

Dari tiga frase di atas dapat disimpulkan bahwa cita-cita yang ingin dicapai pada tahun 2026 adalah reformasi birokrasi yang bermartabat, sumber daya manusia yang semakin maju, dan perekonomian masyarakat yang semakin sejahtera.

### 2.1.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai, untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Demak 2021-2026 . Ada 3 rumusan misi sebagai berikut:

- 1) Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya
- 2) Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- 3) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran

Dari ke 3 misi tersebut, Dinas komunikasi dan Informatika memiliki tugas dan fungsi untuk mendukung dan melaksanakan tercapainya **Misi 1** yaitu :

**“Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang baik, serta kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya”**

untuk pelaksanaan urusan Kominfo, Urusan Statistik dan Persandian Selain itu untuk Dinas Komunikasi dan Informatika juga secara langsung akan berkontribusi mendukung 3 Program unggulan Bupati antara lain :

1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik berbasis “ Smart City”

2. Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan
3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat

## 2.2 TUJUAN DAN SASARAN

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan tercantum pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak selama 5 tahun adalah sebagai berikut :

### Tujuan

Dinas Komunikasi dan Informatika periode 2021-2026 mempunyai 3 tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan publik Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Demak;
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Demak; dan
3. Meningkatkan kinerja pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung akuntabilitas kinerja Pemerintahan 2026.

### Sasaran

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif;
3. Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
4. Meningkatnya kualitas keamanan informasi; dan
5. Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

**Tabel 2.2**  
**Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Demak**

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Satuan	Target					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan pelayanan publik Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Komunikasi dan Informatika	Angka	90,10	90,11	90,12	90,13	90,14	90,14
1.1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsive	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Satuan	Target					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
2.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP Dinas komunikasi dan Informatika	Angka	82,54	83,04	83,54	84,04	84,54	84,54
2.1	Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang mencapai target	%	100	100	100	100	100	100
3.	Meningkatkan kinerja pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah	Indeks SPBE	Angka	3,19	3,24	3,24	3,30	3,30	3,30
3.1	Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Layanan SPBE	Angka	3,00	3,15	3,15	3,30	3,30	3,30
3.2	Meningkatnya kualitas keamanan informasi	Indeks Keamanan Informasi	Angka	1,70	2,20	2,50	2,70	3,00	3,00
3.3	Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks tata kelola SPBE	Angka	3,00	3,10	3,10	3,15	3,15	3,15

### 2.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Arah kebijakan Renstra Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak ditetapkan dengan fokus renja tahunan sejak tahun 2021 hingga tahun 2026. Pada masing-masing Program disusun prioritas Program/urusan yang akan dilaksanakan 5 tahun kedepan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan dan sasaran.

Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak. Adapun tahapan perencanaan yang akan dilakukan dengan strategi yang terukur antara lain :

**Tabel 2.3**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>VISI : Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera</b>					
<b>Misi 1 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya</b>					
<b>Tujuan 1.</b> Meningkatkan pelayanan publik Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan monitoring dan evaluasi</li> <li>• Peningkatan kualitas sumber daya ASN Perangkat Daerah</li> </ul>
<b>Tujuan 2</b> Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	Peningkatan akuntabilitas kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah</li> <li>• Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset Perangkat Daerah</li> </ul>
<b>Tujuan 3.</b> Meningkatkan kinerja pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah	Indeks SPBE	Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Layanan SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Akses Informasi Publik</li> <li>• Membangun pusat data digital demak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perluasan Integrasi Layanan Publik dan kelembagaan</li> <li>• Mempercepat Pengelolaan Data Demak menuju Satu Data Indonesia</li> </ul>
		Meningkatnya kualitas keamanan informasi	Indeks Keamanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun skema layanan digital signature dan pengamanan sistem informasi daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendukung percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).</li> </ul>
		Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks tata kelola SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan dan Pengintegrasian Tata Kelola Informasi dan Kemitraan Komunikasi Publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir</li> </ul>

## 2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai dalam pencapaian target tujuan dan sasaran. Sedangkan target IKU tahunan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas.tahun 2023. pada table berikut :

**Tabel 2.4**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatkan pelayanan publik Dinas Komunikasi dan Informatika		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Komunikasi dan Informatika
	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsive	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika		Nilai SAKIP Dinas komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang mencapai target
Meningkatkan kinerja pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah		Indeks SPBE
	Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Layanan SPBE
	Meningkatnya kualitas keamanan informasi	Indeks Keamanan Informasi
	Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks tata kelola SPBE

## 2.5 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang berada dibawahnya untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima tugas dan kesepakatan antara penerima dan pemberi tugas atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun tertentu, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.



4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Bupati Demak berdasar APBD murni dan APBD Perubahan tahun 2023, adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Perjanjian Kinerja ( PK ) Murni Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan pelayanan publik Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Komunikasi dan Informatika	90,11
1.1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsive	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
2.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP Dinas komunikasi dan Informatika	83,04
2.1	Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang mencapai target	100 %
3.	Meningkatkan kinerja pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah	Indeks SPBE	3,24
3.1	Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Layanan SPBE	3,15
3.2	Meningkatnya kualitas keamanan informasi	Indeks Keamanan Informasi	2,20
3.3	Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks tata kelola SPBE	3.10

Program	Anggaran	Sumber Dana
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 6.561.269.492,00	APBD
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 1.786.960.000,00	APBD
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 1.085.799.000,00	APBD
Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Rp. 221.000.000,00	APBD
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 186.895.000,00	APBD

**Tabel 2.6**  
**Perjanjian Kinerja (PK ) Perubahan Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan pelayanan publik Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Komunikasi dan Informatika	90,26
1.1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsive	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
2.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP Dinas komunikasi dan Informatika	83,04
2.1	Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang mencapai target	100 %
3.	Meningkatkan kinerja pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah	Indeks SPBE	3,24
3.1	Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Layanan SPBE	3,87
3.2	Meningkatnya kualitas keamanan informasi	Indeks Keamanan Informasi	2,20
3.3	Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks tata kelola SPBE	3,15

Program	Anggaran	Sumber Dana
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp 6.334.659.566,00	APBD
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp 946.312.000,00	APBD
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 983.201.700,00	APBD
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 172.095.800,00	APBD
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 136.895.000,00	APBD

## 2.6. PROGRAM DAN KEGIATAN

**Tabel 2.5**  
**Program, kegiatan dan sub kegiatan**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		diLingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
			Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
3	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
			Pelayanan Informasi Publik
			Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
			Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
			Membangun Metadata Statistik Sektoral
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Untuk mencapai indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan dicapai dengan 5 program dan 12 kegiatan dan 44 Sub kegiatan dengan total anggaran murni sebesar Rp. 8.573.164.066,- (Delapan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Puluh Enam Rupiah) Adapun rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

**a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Kinerja Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten Demak dengan 2 indikator kinerja program, rata-rata tingkat ketercapaiannya sebesar 100 %. Kinerja program ini didukung oleh 7 indikator kegiatan dan 28 indikator kegiatan. Rata-rata tingkat ketercapaian seluruh indikator kegiatan dan sub kegiatan tercapai 100 %, maka dapat diketahui tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan dan anggaran sebesar 97,84 % sangat tinggi yang artinya kegiatan yang dilakukan cukup tepat dalam mendukung kinerja program, dengan anggaran sebesar Rp 6.334.659.566,- meliputi 7 (tujuh) kegiatan dan 28 (duapuluh delapan ) sub kegiatan, adapun kegiatan sbb :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**b. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**

Tugas pengelolaan informasi dan komunikasi public bertujuan untuk mendukung kebijakan pemerintah baik pusat maupun kabupaten dengan membuat penyusunan Strategi Komunikasi Publik meliputi menetapkan tujuan komunikasi, menetapkan target khalayak, menetapkan materi /konten, menentukan jenis media, membuat konten atau materi, melaksanakan media komunikasi public Pemkab, menyelenggarakan diseminasi pesan kebijakan dan mengevaluasi penggunaan media komunikasi ditempuh melalui 1 (satu) kegiatan dan 4 (Empat) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 983.201.700,- yaitu Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

**c. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**

Program ini diarahkan untuk meningkatkan Pengelolaan Aplikasi Informatika bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak yang ditempuh melalui 2 kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 946.312.000,- meliputi kegiatan :

1. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain diLingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

**d. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**

Tugas Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral bertujuan untuk Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral serta Membangun Metadata Statistik Sektoral melalui 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dan 4 (empat) sub kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 172.095.800,-

**e. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**

Tugas Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi bertujuan untuk Menetapkan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Menyediakan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ditempuh melalui 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan 2 (dua) sub kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 136.895.000,-



**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023**

**3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Upaya peningkatan kinerja pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung akuntabilitas kinerja pemerintah daerah mengacu tujuan dan sasaran yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU), Adapun Pengukuran kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak digunakan sebagai dasar ukuran pencapaian target keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Demak.

Pengukuran Kinerja dengan perbandingan ketercapaian antara target dengan realisasi. Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian pengukuran kinerja kita dapat menggunakan :

**Tabel 3.1**  
**Interval Nilai Realisasi Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	$\leq 50$	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017, diolah

Tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak telah melaksanakan seluruh Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra dan Renja yang telah dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Tahun Anggaran 2023

Dalam Pengukuran Kinerja dikenal dengan 2 (dua) istilah indikator, yaitu indikator positif dan indikator negatif. Untuk indikator positif berbanding lurus antara target dengan realisasi, artinya semakin tinggi realisasi akan semakin tinggi pula capaian kerjanya. Sedangkan indikator negatif berbanding terbalik antara target dengan realisasinya, semakin rendah realisasi maka capaian kerjanya akan semakin tinggi begitu pula sebaliknya.

Adapun Inspektorat Kabupaten Demak menggunakan Indikator positif dalam Penghitungan persentase pencapaian target kinerja, yaitu Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\% \text{ pencapaian kinerja Target} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Demak mengampu sasaran daerah termuat dalam RPJMD 2021-2026 dan Renstra 2021-2026,

Adapun IKU dan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan pelayanan publik Dinas Komunikasi dan Informatika

**IKU 1 : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Komunikasi dan Informatika**

Sasaran 1 : Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsive

**IKU 3 : Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti**

Tujuan 2 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

**IKU 2 : Nilai SAKIP Dinas komunikasi dan Informatika**

Sasaran 2 : Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

**IKU 4 : Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang mencapai target**

Tujuan 3 : Meningkatkan kinerja pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah

**IKD/IKU 3 : Indeks SPBE**

Formulasi : Nilai indeks menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE sesuai dengan peraturan MenPANRB no 59 Tahun 2020 meliputi 4 Domain : (Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Domain Manajemen SPBE, dan Layanan SPBE)

Sasaran 3 : Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

**IKD/IKU 5 : Indeks Layanan SPBE**

Formulasi : Indikator dalam indeks menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE sesuai dengan peraturan MenPANRB no 59 Tahun 2020 meliputi 2 Aspek: (Aspek Administrasi Pemerintahan berbasis elektronik dan Aspek Pelayanan Publik berbasis elektronik: (Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Domain Manajemen SPBE, dan Layanan SPBE)

**IKD/IKU 6 : Tingkat Ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi**

Formulasi : Perbandingan antara Sistem yang digunakan untuk mengintegrasikan data sektoral dan statistik dengan Sistem yang disediakan oleh Pusat (CKAN)

Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas keamanan informasi

**IKD/IKU 7 : Indeks Keamanan Informasi**

Formulasi : Hasil evaluasi dari BSSN terkait Tingkat kesiapan kabupaten tentang Kelengkapan dan Kematangan dalam penerapan keamanan informasi meliputi 59 aspek antara lain : aspek Tata Kelola, aspek Pengelolaan Risiko, aspek Kerangka Kerja, aspek Pengelolaan Aset, dan Aspek Teknologi.

Sasaran 5 : Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

**IKD/IKU 8 : Indeks Tata Kelola SPBE**

Formulasi : Indikator dalam indeks yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE sesuai dengan peraturan MenPANRB no 59 Tahun 2020 meliputi 3 Aspek : (Aspek . Perencanaan Strategis SPBE, Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Aspek penyelenggara SPBE) sesuai urusan yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Adapun capaian kinerja sesuai dalam dokumen perencanaan strategis Kinerja Dinkominfo Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam Renstra 2021 - 2026, mempunyai 3 urusan (urusan Kominfo, urusan statistik dan urusan persandian) ada target di 8 (delapan) IKU (Indikator Kinerja Kunci) Di tahun 2023 yang harus dicapai, dalam pelaksanaannya didukung oleh 6 program dan 12 kegiatan. Adapun perbandingan antara Realisasi Kinerja s.d Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah adalah sebagai berikut :

**1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;**

Target dan realisasi kinerja tahun 2022 yang dievaluasi pada tahun 2023 dapat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.2  
Target dan realisasi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Dinkominfo Tahun Anggaran 2023**

No	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Th 2023	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian %
1.	Meningkatkan pelayanan publik Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Komunikasi dan Informatika	Angka	90,26	90,26	100
1.1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsive	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100 %	100 %	100

No	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Th 2023	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian %
2.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP Dinas komunikasi dan Informatika	Angka	83,04	83,54	100,51
2.1	Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang mencapai target	%	100 %	100 %	100
3.	Meningkatkan kinerja pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung akuntabilitas kinerja Pemerintahan daerah	Indeks SPBE	Angka	3,24	3,62	111,73
3.1	Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Layanan SPBE	Angka	3,87	4,14	106,98
3.2	Meningkatnya kualitas keamanan informasi	Indeks Keamanan Informasi	Angka	2,20	2,50	113,64
3.3	Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks tata kelola SPBE	Angka	3,15	3,20	101,59

Sumber data : Dinkominfo, 2023

## 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan tercapainya urusan kominfo dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir seperti tabel berikut ini

**Tabel 3.3**  
**Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2021	REALISASI 2022	2023			KRITERIA PENILAIAN
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Komunikasi dan Informatika	90,09	92,20	90,26	90,26	100	Sangat Tinggi
Persentase keluhan masyarakat	100	100	100 %	100 %	100	Sangat Tinggi

INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2021	REALISASI 2022	2023			KRITERIA PENILAIAN
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
yang ditindaklanjuti						
Nilai SAKIP Dinas komunikasi dan Informatika	100	100	83,04	83,54	100,51	Sangat Tinggi
Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang mencapai target	1.00	1.00	100 %	100 %	100	Sangat Tinggi
Indeks SPBE	3,10	3,10	3,24	3,62	111,73	Sangat Tinggi
Indeks Layanan SPBE	3,85	3,85	3,87	4,14	106,98	Sangat Tinggi
Indeks Keamanan Informasi	1.00	2,00	2,20	2,50	113,64	Sangat Tinggi
Indeks tata kelola SPBE	3.10	3,10	3,15	3,20	101,59	Sangat Tinggi

Sumber data: Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan dan layanan publik berbasis TIK

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan tercapainya urusan kominfo, urusan statistik dan urusan persandian Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun perbandingan antara realisasi capaian utama tahun 2023 dengan capaian akhir RPJMD seperti tabel berikut ini :

Dari Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak tahun 2021 dan tahun 2022 capaian sangat tinggi menunjukkan kurva yang konstan

### 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

**Tabel 3.4**  
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	TARGET AKHIR RPJMD (2026)	Realisasi tahun 2023	CAPAIAN s/d 2023 TERHADAP 2026
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Komunikasi dan Informatika	Angka	90,14	90,26	100,13 %
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Angka	100	100 %	100 %
3	Nilai SAKIP Dinas komunikasi dan Informatika	%	84,54	83,54	98,82 %
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang mencapai target	%	100	100 %	100 %
5	Indeks SPBE	Angka	3,20	3,62	113,13 %

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	TARGET AKHIR RPJMD (2026)	Realisasi tahun 2023	CAPAIAN s/d 2023 TERHADAP 2026
6	Indeks Layanan SPBE	Angka	3,30	4,14	125,45 %
7	Indeks Keamanan Informasi	Angka	3,00	2,50	83,33 %
8	Indeks tata kelola SPBE	Angka	3,15	3,20	101,59 %

umber data : Data sekretariat – diolah

Dari table diatas dapat dilihat bahwa dari 3 tujuan diuraikan capaian tujuan 1 dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan tujuan 3 dengan indikator Indeks SPBE sudah tercapai 3,62 % sudah melebihi target akhir RPJMD sebesar 113,13 % tetapi pada tujuan 2 dengan indikator Nilai SAKIP Dinas komunikasi dan Informatika masih 98,82 %

Sedangkan untuk ke 5 indikator sasaran diuraikan capaian sasaran 1 dengan indikator Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti mencapai 100 %, indikator sasaran 2 Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika sudah tercapai 100 %, indikator sasaran 3 Indeks Layanan SPBE sudah tercapai 125.45 % , indikator sasaran 5 Indeks tata kelola SPBE sudah tercapai 101,59 % sudah menunjukkan ketercapaian kinerja akhir RPJMD tahun 2023 masih ada 1 indikator pada sasaran 5 Indeks Keamanan Informasi belum 100 % masih 83,33 %

#### 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

Tujuan Meningkatkan kualitas pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan melalui Indikator Kinerja Utama pemerintah Kabupaten Demak yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak, dimana pada Peraturan Bupati sebelumnya disebutkan bahwa Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak adalah Meningkatkan kualitas pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan

Hasil Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2022. Menggunakan perolehan hasil evaluasi tahun 2021, Evaluasi dari kementerian Pendayagunaan Revormasi, Birokrasi tahun 2023 mencapai indeks seperti pada table dibawah ini :

**Tabel 3.5**  
**Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks SPBE**

Hasil Evaluasi SPBE	Indeks 2021	Indeks 2023
Indeks SPBE	3,19	3,62
<b>DOMAIN</b>	<b>2021</b>	<b>2023</b>
Kebijakan SPBE	3,50	3,60



Hasil Evaluasi SPBE	Indeks 2021	Indeks 2023
Tata Kelola SPBE	3,10	3,20
Manajemen SPBE	1.36	2.82
Layanan SPBE	3,82	4,14

Hasil nilai dari Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak tahun 2019 diatas menunjukkan capaian sangat tinggi, Indikator ini merupakan indicator kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak yang tertuang dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak.

Indikator ini dipilih karena berlakunya Perpres No.95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mengamanahkan pemerintahan dilakukan secara digital. SPBE menggambarkan tingkat kematangan (Maturity level) pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Sasaran Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik berdasar standar pelayanan dan dengan diterapkannya system pemerintahan berbasis elektronik, maka akan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Target dari indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2021 sebesar 3,00 dan penilaian dilakukan satu tahun sekali oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Revormasi Birokrasi (Menpan-RB) di tahun ke 2 ini tetap melakukan upaya perbaikan-perbaikan dibidang TIK dan penerapan dalam implementasi e- Government sehingga capaian kinerja tahun 2021 tercapai 106,33

Jika dibandingkan Indeks SPBE tahun 2019 ke 2021, secara kasat mata terjadi penurunan indeks SPBE di Kabupaten Demak. Penurunan Indeks SPBE bukan berarti terjadi penurunan kinerja, karena penurunan indeks ini dialami oleh seluruh pemerintah baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Secara nasional Indeks SPBE mengalami penurunan dari 3,74 menjadi 3,19 kemudian di tahun 2021. pada RKPD tahun 2020. Dinkominfo melakukan revisi pada target indeks SPBE di tahun 2021 semula 4.00 menjadi 3.00. dan di tahun 2022 tidak ada evaluasi sehingga capaian menggunakan capaian Tahun 2021. Kemudian pada perubahan renja 2023 ada revisi target pada indicator Tujuan indeks SPBE menjadi 3,19

Adapun tujuan SPBE adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dan mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

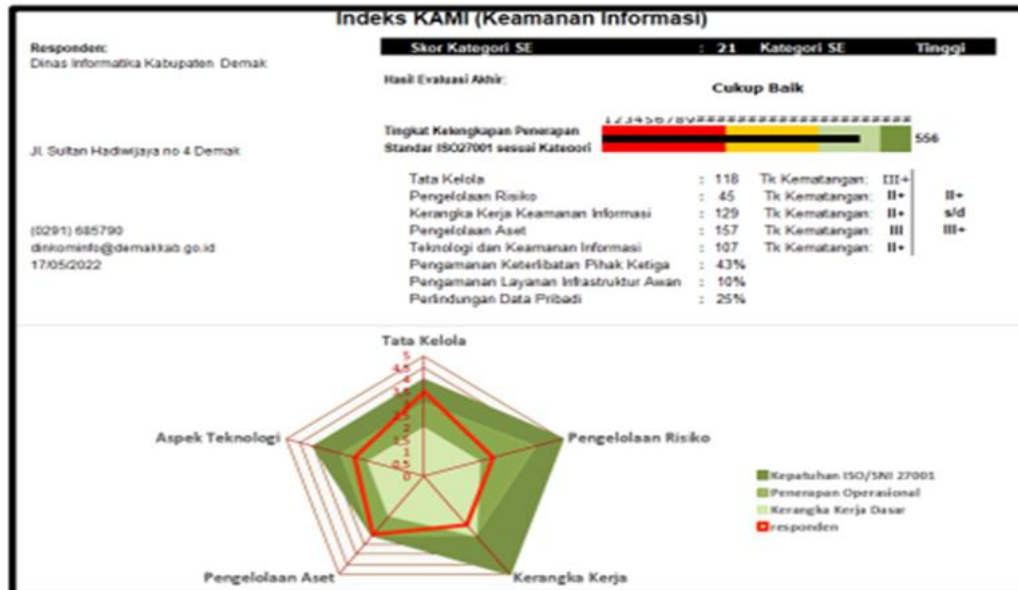
Di tahun 2023 ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak dalam pelaksanaan kegiatan Interview dilakukan klarifikasi dan validasi lebih lanjut oleh Asesor Eksternal Kementerian PAN-RB, Dean Apriana Ramadhan, melalui daring zoom meeting, terhadap bukti dukung yang telah disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui aplikasi Evaluasi SPBE, ditemukan beberapa catatan perbaikan yang harus dilengkapi oleh Tim SPBE Kabupaten Demak. Adapun hasil evaluasi penilaian Indeks SPBE Tahun 2023 memperoleh angka indeks 3,62

Dilihat dari ranking secara Nasional maupun Regional Propinsi Jawa Tengah, Indeks SPBE dengan katagori “Sangat Baik”.

Beberapa hal yang secara nasional menyebabkan Indeks SPBE mengalami penyesuaian adalah :

- a. Terjadi penambahan domain pada indikator SPBE tahun 2021 yang semula 37 indikator menjadi 47 indikator. (penambahan 10 indikator). Penambahan indikator tersebut tidak memungkinkan Pemerintah Kabupaten dapat segera melakukan penyesuaian karena masih menunggu regulasi di Tingkat Pusat.
- b. Muncul Keputusan Menteri PAN RB nomor 962 tahun 2021 yang terbit di bulan Mei 2021, sebagai penjabaran dari PermenPAN RB nomor 59 tahun 2020. Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan upaya perbaikan dalam waktu segera, karena anggaran sudah berjalan.

Dalam upaya menilai kualitas keamanan informasi di Kabupaten Demak telah dilaksanakan assessment Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Penilaian Indeks KAMI terdiri dari 5 (lima) area yaitu antara lain: area tata kelola keamanan informasi, area pengelolaan resiko keamanan informasi, area kerangka kerja pengelolaan keamanan informasi, area pengelolaan aset dan area teknologi dan keamanan informasi. Hasil dari assessment Indeks KAMI pada Pemerintah Kabupaten Demak tahun 2023 pada kategori Sistem Elektronik Tinggi, dengan ruang sistem elektronik Cengkeraman Mata Elang (CME) dengan url:cme.demakkab.go.id pada nilai ahir 556, dengan indeks III+ serta hasil evaluasi akhir ‘ Cukup Baik’.



Dari hasil assessment Indeks KAMI oleh Badan Siber dan Sandi Negara memberikan rekomendasi untuk dilengkapi dan dijalankan, adapun rekomendasinya adalah sebagai berikut:

1. Perlu melakukan review terhadap kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi terutama pada penerapan pengamanan data pribadi
2. Perlu melakukan evaluasi susunan keanggotaan pada SK Pengelolaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi
3. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kerangka kerja pengelolaan resiko serta risk register dari penilaian resiko
4. Terkait kontrak dengan pihak ketiga perlu disertakan aspek keamanan informasi mencakup pelaporan insiden, menjaga kerahasiaan, HAKI, tata tertib penggunaan dan pengamanan aset maupun layanan TIK
5. Melakukan evaluasi hasil audit internal terkait dengan Langkah pembenahan dan pencegahan yang diperlukan serta melaporkan ke pimpinan.
6. Perlu Menyusun dan menetapkan kerangka kerja pengelolaan perencanaan kelangsungan layanan TIK (Business continuity palnning)
7. Perlu review prosedur pengelolaan perubahan yang menyeluruh terhadap sistem, proses bisnis dan proses teknologi informasi
8. Perlu Menyusun dan menerapkan kebijakan pebgelolaan aturan keamanan informasi terkait keterlibatan pihak ketiga, pemanfaatan layanan cloud dan perlindungan data pribadi yang digunakan.

## **5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan sbb :

**faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja :**

### **Urusan Kominfo**

- a. Adanya aplikasi SPLP sebagai jembatan penghubung (bridging) API ke aplikasi integrasi
- b. Konektivitas aplikasi SPLP, SDM Programmer Dinkominfo dan Kerjasama dengan Perangkat Daerah pemilik aplikasi
- c. Proses migrasi ke cloud PDN dan Data Center Prov Jateng; Kerjasama yang baik dengan kemenkominfo dan Dinkominfo Prov Jateng
- d. Penguatan peralatan video conference untuk keperluan zoom meeting dan streaming
- e. Kabupaten Demak masuk dalam 100 Kabupaten/kota yang mendapatkan pendampingan dari Kemenkominfo di Tahun 2019, dilanjutkan di tahun 2021 dengan penghargaan "Implementasi Smart City Terbaik pada kategori Smart Society", selanjutnya di Tahun 2022 dengan "Penghargaan Implementasi Smart City Terbaik pada kategori Smart Living" dan selanjutnya pada tahun 2023 dengan "Penghargaan Implementasi Smart City Terbaik pada Program Kolaborasi pada Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional"
- f. Dukungan dari pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan
- g. Penilaian indeks SPBE yang selalu mendapatkan nilai yang baik dan memuaskan
- h. Koneksi yang cepat dan stabil di setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak mendorong Dinkominfo untuk melakukan Peningkatan koneksi internet Perangkat Daerah yang masih menggunakan koneksi Radio
- i. Koneksi intranet yang meningkat seiring perkembangan teknologi
- j. Sudah Tersosialisasikannya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) ke seluruh desa di wilayah Kabupaten Demak
- k. SDM Admin PPDI Kabupaten
- l. Monev Website dan Medsos PPID
- m. Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik 2023" (Kabupaten Informatif)
- n. Penyediaan media komunikasi sebagai saluran informasi antara pemerintah dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah
- o. Tersampainya informasi pembangunan, kebijakan pemkab dan hasil pembangunan.
- p. Proses migrasi ke cloud PDN dan Data Center Prov Jateng

- q. Kerjasama yang baik dengan kemenkominfo dan Dinkominfo Prov Jateng
- r. Penguatan peralatan video conference untuk keperluan zoom meeting dan streaming"

#### **Urusan Statistik**

- s. Koordinasi yang baik dalam pengumpulan data prioritas
- t. Kesanggupan, keseriusan dan komitmen perangkat daerah dalam memenuhi data yang dibutuhkan"
- u. Komunikasi antara admin dan tim statistik dalam proses transfer knowledge meski ada pergantian personel
- v. Kedisiplinan admin data dalam memenuhi/ menginput metadata sektoral di OMAE
- w. Sosialisasi dan bimtek dari BPS sehingga Admin lebih memahami pentingnya metadata sebagai identitas data
- x. Sekretaris dinas selaku walidata pendukung melaksanakan tugas fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga proses pengumpulan dan verifikasi tahap 1 dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan target

#### **Urusan Persandian**

- a. Terjalannya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan BSSN
- b. Komitmen bersama dan kerjasama yang baik pada internal Dinkominfo serta dengan OPD
- c. SDM"
- d. Adanya aplikasi AMS untuk monitoring TTE
- e. Terjalannya hubungan yang baik dengan BSSN
- f. Sarana dan prasarana serta komitmen bersama"

#### **Permasalahan / Hambatan yang masih ada dalam pencapaian sasaran ini adalah :**

Untuk pencapaian kinerja tujuan dan sasaran ada beberapa permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan program kegiatan, adapun program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target indikator Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat yang ditindaklanjuti Telah tercapai 100 % dan indikator Persentase Pelayanan sesuai Standar Pelayanan juga tercapai 100 % dari kedua indikator tidak ada permasalahan dalam pencapaian target.

Sedangkan pendukung pelaksanaan teknis sbb :

- 1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan target angka indikator 98.80 telah tercapai angka 98.80 atau 100 % target tercapai tetapi masih ada kendala :

- a. belum semua desa memiliki kepedulian terkait peran KIM sebagai perpanjangan tangan pemerintah
  - b. Adanya perubahan admin PPID Kabupaten
  - c. Konten website & medsos belum terupdate
  - d. SAQ belum terisi"
  - e. belum semua media informasi dapat di akses atau dimiliki masyarakat
  - f. informasi yang diterima masyarakat masih kurang
  - g. Belum sepenuhnya masyarakat menguasai teknologi informasi.
  - h. Masyarakat perlu dan berhak mengetahui informasi / kebijakan pembangunan pemerintah.
  - i. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap UU cukai dan masih banyaknya pelanggaran peredaran rokok illegal.
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan target indicator 59,52 % Telah tercapai 64,28% atau 108 .% dan sudah melebihi target, tetapi masih ada kendala :
- a. Belum semua API aplikasi PD yang dikirim untuk integrasi
  - b. Adanya beberapa perbedaan platform dari developer, sehingga menyulitkan programmer dalam mengembangkan aplikasi
  - c. masih sering terjadi kendala server cloud pdn down mengakibatkan layanan aplikasi di seluruh perangkat daerah terhenti
  - d. Kendala TKDN dalam pengadaan peralatan video conference
  - e. Ketersediaan Anggaran dan Keberlanjutan Renaksi dari OPD, yang kurang konsisten, sehingga tidak sesuai dengan Masterplan yang telah ada
  - f. Kesulitan menyesuaikan dengan jadwal pimpinan sehingga tidak semua pimpinan dapat mengikuti karena kesibukannya
  - g. Pemahaman terhadap tiap indikator indeks SPBE yang masih kurang dari pengampu indikator, dan kepedulian untuk menerapkan apa yang menjadi panduan dari SPBE yang masih belum bisa Optimal
  - h. Peralatan penunjang jaringan yang belum maksimal dan kebutuhan bahan material jaringan yang terbatas anggaran
  - i. Belum maksimalnya peralatan penunjang infrastruktur jaringan intra Pemerintah Daerah
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial dengan target indicator 100 % Telah tercapai 100 %. atau 100 %. Target tercapai, tetapi masih ada permasalahan :
- a. Masih sering terjadi kendala server cloud pdn down mengakibatkan layanan aplikasi di seluruh perangkat daerah terhenti
  - b. Kendala TKDN dalam pengadaan peralatan video conference"



- c. Masih banyak data prioritas yang double, salah jadwal pengumpulan, dan bukan wewenang OPD tertentu.
  - d. Kurangnya komitmen perangkat daerah dalam pemenuhan data proiritas yang telah disepakati
  - e. Data yang dikumpulkan PD masih berupa data agregat sehingga mempersulit proses verifikasi"
  - f. Sering terjadi pergantian admin data sektoral dan geospasial mempersulit proses transfer knowledge dari pusat ke daerah
  - g. Masih banyak PD yang belum memahami pentingnya metadata sebagai identitas data yang dikumpulkan
  - h. Keterbatasan tenaga admin dalam menyelesaikan metadata"
  - i. Kurangnya pemahaman pentingnya forum satu data indonesia tingkat kabupaten Demak, sehingga sekretaris dinas sebagai walidata pendukung kurang memahami tugas fungsinya sebagai walidata pendukung dalam forum SDI tingkat Kab. Demak
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan target indicator.70,00 % Telah tercapai 70.00 % . atau 100 % . Target tercapai, tetapi masih ada permasalahan :
- a. OPD yang mempunyai aplikasi tidak menganggarkan untuk kegiatan ITSA, menunggu pergeseran anggaran.
  - b. Insiden siber masih terjadi
  - c. Kurangnya ketersediaan SDM dan sarana prasarana
  - d. Pengelola aplikasi SIDAK belum familier tentang API untuk integrasi dengan TTE.
  - e. Pengelola aplikasi SIDAK masih kesulitan saat menampilkan dokumen yang telah di TTE untuk diverifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut.
  - f. Pemenuhan data dukung Indeks KAMI, terutama pada area Suplemen yang melibatkan pihak ke tiga.
  - g. OPD yang meminta layanan TTE sering menghubungi melalui telepon maupun whatsapp, tidak bersurat secara resmi, sehingga sulit untuk di dokumentasikan.
  - h. Tim verifikator Dinkominfo tidak mendapatkan data pejabat yang purna tugas sehingga menyulitkan petugas untuk update data.

## **6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Suatu program atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan realisasi dengan standar biaya. Dengan kata lain efisiensi merupakan sebuah metode perbandingan antara usaha yang dilakukan dengan hasil yang ingin dicapai dalam melakukan kegiatan.
- b) Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif program atau kegiatan yang dilaksanakan. Perlu diketahui bersama bahwa program dan kegiatan pada Dinkominfo Kabupaten Demak lebih banyak bersifat output yang tidak berwujud dan tidak mudah untuk dikuantifikasi, maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut adalah karena pencapaian hasil sering tidak bisa diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi jangka panjang setelah program berakhir, sehingga ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja.

Secara rinci tingkat efisiensi dan efektifitas dapat dilihat dari capaian kinerja sasaran dengan perbandingan capaian program baik program rutin maupun program teknis sebagaimana pada table berikut :

**Tabel 3.6**  
**Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Periode 2022 - 2026**  
**Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan				
					Target	Realisasi	(%)		Program	Pagu	Realisasi	%
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	01.01	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.631.211.566	2.606.866.561	99.07
		<b>RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR</b>						<b>100</b>	<b>TOTAL PER SASARAN</b>	<b>2.631.211.566</b>	<b>2.606.866.561</b>	<b>99.07</b>
		<b>TINGKAT EFISIENSI 200.19 %</b> <b>TINGKAT EFEKTIFITAS 300.58 %</b>										
2	Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika	02.01	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang mencapai target	%	100	100	100	2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.703.448.000	3.559.345.539	96.11
		<b>RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR</b>						<b>100</b>	<b>TOTAL PER SASARAN</b>	<b>3.703.448.000</b>	<b>3.559.345.539</b>	<b>96.11</b>
		<b>TINGKAT EFISIENSI 41.94 %</b> <b>TINGKAT EFEKTIFITAS 144.59 %</b>										
3	Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	03.01	Indeks Layanan SPBE	Angka	3.87	5	158.00	3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	983.201.700	979.260.500	99.60
								4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	172.095.800	170.271.000	98.94
		<b>RATA-RATA CAPAIAN DARI INDIKATOR</b>						<b>128.33</b>	<b>TOTAL PER SASARAN</b>	<b>1.155.297.500</b>	<b>1.149.531.500</b>	<b>99.50</b>
<b>TINGKAT EFISIENSI 28.79 %</b> <b>TINGKAT EFEKTIFITAS 129.02 %</b>												
4	Meningkatnya kualitas keamanan informasi	4.1	Indeks Keamanan Informasi	Angka	2,2	2,5	113.00	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	136.895.000	135.487.519	98.97
		<b>RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR</b>						<b>113.00</b>	<b>TOTAL PER SASARAN</b>	<b>136.895.000</b>	<b>135.487.519</b>	<b>98.97</b>

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan					
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%		
	<b>TINGKAT EFISIENSI 18.48 %</b> <b>TINGKAT EFEKTIFITAS 118.63 %</b>											
5	Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	5.1	Indeks tata kelola SPBE	Angka	3,15	4,73	152.00	6	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	946.312.000	935.206.946	98.83
		<b>RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR</b>					<b>152.00</b>	<b>TOTAL PER SASARAN</b>	<b>946.312.000</b>	<b>935.206.946</b>	<b>98.83</b>	
	<b>TINGKAT EFISIENSI 8.46 %</b> <b>TINGKAT EFEKTIFITAS 108.50 %</b>											
							<b>TOTAL KESELURUHAN</b>	<b>8.573.164.066</b>	<b>8.386.438.065</b>	<b>97.82</b>		

Sumber data [https://sakip.demakkab.go.id/laporan/efisiensi\\_kinerja](https://sakip.demakkab.go.id/laporan/efisiensi_kinerja)

**7 Analisi program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Analisis Kesesuaian program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja sebagai berikut :

**A. Urusan Kominfo :**

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Pada program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target indicator Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat yang ditindaklanjuti Telah tercapai 100 % dan indicator Persentase Pelayanan sesuai Standar Pelayanan juga tercapai 100 % dari kedua indikator tidak ada permasalahan dalam pencapaian target.

**Tabel 3.7  
Tingkat Kesesuaian Antara Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kominfo**

No	Program /Kegiatan	Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	108 %
		Persentase Pelayanan sesuai Standar Pelayanan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	108 %
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah	4	7	175 %	9 dokumen	13	144,44 %
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	65	76	96,20 %	72 Dokumen	72	100 %
c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	125	530	278,95 %	2130 orang	2190	103 %
d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	83	109	103,1 %	114 paket	123	108 %
e	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang disediakan	-	-	-	10 Unit	75	750 %
f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Yang Tersedia	9 unit	10	100 %	11 laporan	11	100 %
g	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah BMD yang terpelihara	27 unit	32	100 %	58 Unit	141	243 %

Dinas Komunikasi dan Informatika Demak melalui Bidang Sekretariat melaksanakan :

1. Pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan APBD di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika selama 1 tahun anggaran.
2. Menyusun dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika.
3. Melakukan pelaporan Akuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak sekaligus melaporkan juga kepada Kementerian terkait (Kemendagri, KemenPAN-RB, dll) baik secara manual ataupun aplikasi.
4. Melakukan kegiatan yang bersifat peningkatan kelembagaan seperti
  - a. Peningkatan aparatur melalui diklat
  - b. Peningkatan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah di Dinas Komunikasi dan Informatika
  - c. Melakukan sosialisasi perundang-undangan pada di bidang penegakan Hukum kegiatan DBHCHT

**2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**

Capaian Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan indicator Persentase aplikasi e-gov yang terintegrasi dengan portal Daerah tahun 2022 dan 2023 disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.7**  
**Tingkat Kesesuaian Antara Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kominfo**

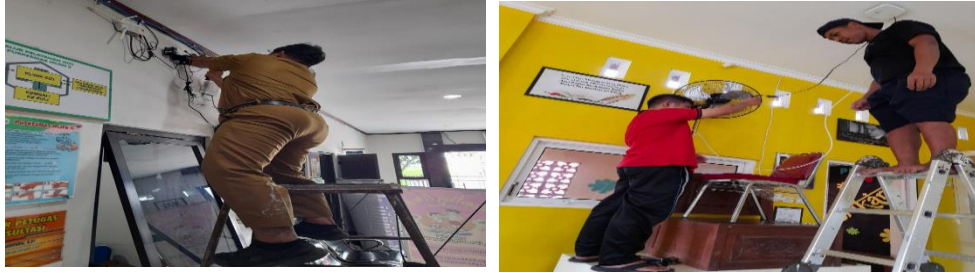
No	Program /Kegiatan	Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase aplikasi e-gov yang terintegrasi dengan portal Daerah	54,76	54,76	100 %	59,52	64,28	108 %
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah	41 OPD	41	100 %	41 OPD	41	100 %
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi yang telah terintegrasi	2 unit	2	100 %	2 unit	4	200 %

Target 59,52 telah tercapai angka 64,28 atau 108 % % dengan katagori Kabupaten Informatif, untuk pencapaian tersebut didukung dengan pelaksanaan kegiatan sbb :

**a. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah**

Dalam penyelenggaraan sistem jaringan intra Pemerintah Daerah dilakukan pengembangan jaringan dan pekerjaan rutin untuk memastikan

jaringan internet dan intranet dapat berfungsi dengan baik, pekerjaan rutin yang dilakukan yaitu pemantauan dan pengecekan kondisi jaringan intranet dan internet, apabila ditemukan peralatan jaringan yang rusak maka dilakukan pemeliharaan atau penggantian peralatan jaringan yang rusak.



*Foto Kegiatan Pemantauan dan Pemeliharaan Jaringan*

Sedangkan untuk pengembangan jaringan kita lakukan dengan meningkatkan koneksi yang dahulu menggunakan akses point kita tingkatkan pemasangan kabel *Fiber Optic* (FO) dengan harapan koneksi akan lebih stabil saat menggunakan kabel FO.



*Kegiatan Uji Materi dan Tinjauan Lokasi Pengajuan Pembangunan Menara*



*Telekomunikasi dari Tower Provider*

## **b. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik**

Dalam mendukung pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik telah dilakukan beberapa pembangunan dan pengembangan aplikasi, baik aplikasi layanan publik maupun layanan administrasi pemerintahan yang meliputi:

### **1) Integrasi Sistem Layanan Penghubung Instansi Pemerintah (SPLP)**

Integrasi sistem layanan penghubung instansi pemerintah terdapat kendala yaitu belum semua API bisa diintegrasikan kedalam aplikasi SPLP, namun



hal ini telah dilakukan perbaikan yaitu Dalam penyusunan KAK, setiap OPD disarankan untuk mencantumkan pembuatan API.

Daftar API Aplikasi Demak					
No	Aplikasi	URL	OPD	URL API	
1	Cengkrang	https://cengkrang.demak.go.id	Dinas Kesehatan	https://cengkrang.demak.go.id/api/	
2	Sistem Informasi Pendaftaran Daerah (SIPAD)	https://sipad.demak.go.id	BMKG	https://sipad.demak.go.id/api/	
3	Sistem Informasi Monitoring Tenaga Kerja (SIMTK)	https://simtk.demak.go.id	Dinas Tenaga Kerja dan Produktivitas	https://simtk.demak.go.id/api/	
4	Sistem Informasi E-Call Service (SISER)	https://siser.demak.go.id	Badan Karce Sewanara Daerah	https://siser.demak.go.id/api/	
5	Sistem Informasi Perencanaan Kota (SIPK)	https://sipk.demak.go.id	Dinas Perencana	https://sipk.demak.go.id/api/	

## 2) Pemeliharaan aplikasi CME

Aplikasi cengkraman mata elang (CME) adalah layanan yang hadir untuk menjawab seluruh masalah tingginya kematian ibu hamil dan bayi yang ada dimasyarakat kabupaten Demak. Aplikasi cengkraman mata elang (CME) sangat diperlukan oleh petugas kesehatan dalam melaporkan ibu hamil, pemantauan ibu hamil beresiko tinggi, memonitor data ibu hamil dan bayi, serta mengidentifikasi awal ibu hamil beresiko tinggi yang ada dikabupaten demak. Melihat aplikasi yang sangat berguna, diperlukan pemeliharaan aplikasi cengkraman mata elang (CME) dengan menambahkan beberapa menu, meliputi : Pencatatan Kelahiran Anak, Pencatatan Hasil Posyandu (Tiap Bulan), Pemantauan Skrening Awal Stunting berdasarkan BB Anak, Tidak Lanjut Hasil Skrening dan Pemantauan Tumbuh Kembang Anak.



## c. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

### 1) Assesment Top Digital Award 2023

TOP Digital Awards adalah kegiatan penilaian & penghargaan IT Telco Digital terbesar di Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan implementasi dan pemanfaatan solusi digital di instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan di Indonesia, untuk mendukung peningkatan daya saing perekonomian nasional, menuju Indonesia yang maju dan sejahtera.



*Top Digital*

- 2) Meningkatnya layanan vidcon di command center pada masa pandemi membuat peralatan mudah sekali mengalami kerusakan, maka dari itu perlu dilakukan pemeliharaan peralatan secara berkala. Penambahan peralatan (camera studio, extender mix dan laptop) sangat diperlukan untuk mendukung operasional lapangan karena banyaknya permintaan vidcon oleh OPD. Dan untuk mendukung komunikasi antar forkompimda dilakukan pengadaan peralatan command center mini meliputi: TV Interaktif, Camera Studio, Laptop, Extender Mix, Mobile Bracket dan Stand Camera.



- 3) Mendaftarkan akun desa di website Sideka-NG  
Aplikasi Sideka-NG adalah aplikasi yang memungkinkan setiap desa mendapatkan situs khusus berdomain desa.id. Hal ini dapat membantu warga desa untuk membuat sendiri sistem pelayanan desa berbasis digital secara gratis.

User Activity			
Tanggal	Nama	Akses	# Akses
2022-01-14 10:00	Andi Nugroho	login	100
2022-01-14 10:01	Andi Nugroho	login	100
2022-01-14 10:02	Andi Nugroho	login	100
2022-01-14 10:03	Andi Nugroho	login	100

- 4) Sosialisasi Jogosantri  
Aplikasi Jogo Santri merupakan hasil dari program master plan smart city. Karena Demak notabennya kota wali maka di perlukan pergerakan persantren melalui dunia maya dengan aplikasi tersebut. Maka untuk memaksimalkan penggunaan aplikasi Jogosantri diperlukan adanya sosialisasi khususnya untuk pondok pesantren.



#### **d Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas**

Tahun 2023 ini telah dilakukan review masterplan smartcity dengan menghapus atau mengundurkan pelaksanaan kegiatan.

Pada evaluasi akhir tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Demak menerima Penghargaan Program Smart City kategori Program Kolaborasi pada Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional dari Menteri Komunikasi dan Informatika RI.



#### **e Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)**

Peningkatan SDM TIK di Dinkominfo sangat diperlukan dalam menunjang tugas, pokok dan fungsi pengelola TIK di Kabupaten Demak. Untuk itu dilakukan sosialisasi GCIO di Binapraja Demak untuk memperdalam pengetahuan tentang GCIO.



#### **f Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE**

Pada tahun 2023 target Nilai Indeks SPBE Kabupaten Demak adalah 3,24, turun dari tahun sebelumnya karena ada penambahan domain Manajemen semula 37 menjadi 47 indikator. Untuk mencapai target telah dilakukan beberapa upaya diantaranya:

- 1) Menyiapkan kegiatan yang mendukung untuk pencapaian dan peningkatan nilai SPBE salah satunya adalah melakukan audit internal untuk aplikasi yang mendukung spbe menggunakan audit tools yang dikeluarkan oleh BRIN

- 2) Pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan nilai SPBE salah satunya dengan melaksanakan Audit Internal SPBE terhadap 2 Aplikasi Yaitu CME dan PATEN, dan selain itu juga terhadap Infrastruktur yaitu Jaringan Intra Pemerintah Daerah dan Sistem Penghubung layanan Pemerintah
- 3) Menyiapkan data2 dukung yang nantinya dapat digunakan dalam Penilaian SPBE di tahun 2023, antara lain dan membahas dengan stake holder terkait, tentang langkah langkah yang diperlukan untuk meningkatkan nilai indeks SPBE yang diinginkan
- 4) Dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana yang sudah ada belum sesuai dengan pedoman peraturan terbaru, sehingga perlu diadakan penyesuaian



## 2 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Capaian Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan indicator Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Tingkat Jawa Tengah Target 98.80 telah tercapai angka 98.56 atau 99,76 % dengan katagori Kabupaten Informatif, untuk capaian tahun 2022 dan 2023 seperti tabel berikut :

**Tabel 3.8**  
**Tingkat Kesesuaian Antara Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kominfo**

No	Program /Kegiatan	Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Tingkat Jawa Tengah	98.80	98.80	100 %	98.80	98.56	99,76 %
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komunikasi dan informasi publik yang dikelola	5	5	100 %	5	5	100 %

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, bertujuan untuk mendukung kebijakan pemerintah baik pusat maupun kabupaten dengan membuat penyusunan Strategi Komunikasi Publik meliputi menetapkan tujuan komunikasi, menetapkan target khalayak, menetapkan materi /konten, menentukan jenis media, membuat konten atau materi, melaksanakan media komunikasi publik pemkab, menyelenggarakan diseminasi



pesan kebijakan dan mengevaluasi penggunaan media komunikasi., dengan melaksanakan pengumpulan informasi untuk pencapaian tersebut didukung dengan pelaksanaan kegiatan sbb :

**a) Pengelolaan Media Komunikasi Publik**

1. Membuat dan menyajikan informasi pembangunan melalui berita yang diunggah pada website demakkab.go.id dan website dinkominfo.demakkab.go.id.



Sumber : dinkominfo.demakkab.go.id.



Sumber : demakkab.go.id

2. Sosialisasi melalui Media Outdoor dan Tatap Muka

Memberikan sosialisasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat, baik secara talkshow maupun podcast di Radio Suara Kota Wali.



Talkshow dengan Narasumber



Podcast dengan Forkopimda

3. Mengelola media sebagai jembatan komunikasi seperti media sosial, media digital, media elektronik

Selain mengelola informasi (berita) melalui website juga melaksanakan pengelolaan media sosial yang bertujuan menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui instagram, facebook, youtube dan tweeter.



4. Melaksanakan publikasi visual luar ruang

Melaksanakan publikasi melalui baliho, spanduk, banner, yang bertujuan untuk menjangkau warga pedesaan dan masyarakat pada umumnya.



**b) Pelayanan Informasi Publik**

1. Pelayanan Informasi Publik merupakan tugas memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat maupun pemohon informasi. Dengan cepat, mudah dan tepat waktu. Sehingga diharapkan dapat memberikan kepuasan bagi publik. Namun demikian ada pengecualian informasi publik yang bersifat ketat dan terbatas sesuai dengan aturan yang berlaku.

Informasi yang diberikan kepada publik melalui penyelenggaraan PPID kabupaten, dan mampu mengantarkan Kabupaten Demak sebagai Kabupaten Informatif di Tingkat Jawa Tengah.



2. Menyelenggarakan Penyiaran Radio

Dinkominfo menyelenggarakan pengelolaan media informasi melalui penyiaran radio LPPL RSKW 104.8 FM. Yang merupakan media komunikasi massa yang mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial dan perekat sosial. Di Tahun 2023 RSKW FM telah meraih penghargaan dari KPID Jawa Tengah yaitu sebagai LPPL (Lembaga Penyiaran Publik Lokal) Terbaik Nomor 2;



*LPPL Terbaik Nomor 2*

**c) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan**

Perolehan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) menjadi salah satu pendapatan negara yang bersifat khusus dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan ke Pemerintah Provinsi ataupun Kabupaten/ Kota penghasil cukai hasil tembakau dan atau penghasil tembakau. Semakin banyak rokok bercukai

resmi beredar di pasaran, maka semakin besar pendapatan DBHCHT yang akan dikembalikan ke daerah dan semakin sedikit peredaran rokok ilegal pemerintah semakin terbantu di banyak sektor. Maka dari itu diperlukan sosialisasi untuk membasmi rokok ilegal.



*Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal di Gedung Kesenian Tembiring*

#### **d) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas**

Dalam pelaksanaannya untuk mendukung penyampaian informasi dan kebijakan pemkab kepada masyarakat perlu membangun pola komunikasi yang baik dengan elemen masyarakat dengan menjalin kemitraan bersama komunitas maupun kelompok masyarakat . Melalui penyelenggaraan hubungan masyarakat ,media dan kemitraan ini dapat terwujud kerja sama yang baik antara OPD, media dan mitra komunitas. Sehingga pesan pesan maupun informasi kebijakan pemkab dapat tersampaikan kepada publik dengan baik dan sesuai yang diharapkan. Adapun media dan kemitraan yang telah dilaksanakan seperti :

##### **1. Forum Komunikasi Media Tradisional / FK METRA**

Menjalin kemitraan dengan para pelaku seni yang ada untuk pelaksanaan diseminasi informasi melalui kesenian daerah dalam menyampaikan pesan sosialisasi. Kegiatan Diseminasi yang dilakukan melalui pagelaran kesenian daerah seperti:

- Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal yang menghadirkan *Guest Star*
- Friday Night Accoustic (FNA) *live streaming* di Youtube Dinkominfo Demak



##### **2. Kelompok Informasi Masyarakat/ KIM**

Menjalin kemitraan dengan pelaku usaha untuk menyampaikan informasi maupun kebijakan pemkab serta mengkomunikasikan hasil hasil pembangunan. Pengelolaan KIM termasuk didalamnya pemberdayaan



masyarakat/pelaku usaha dalam meningkatkan nilai tambah taraf kehidupannya.

Implementasi dari kegiatan KIM telah dibuatkan media promosi berupa aplikasi DEK GITA (Demak Digitalisasi KIM dan FK METRA) yang merupakan media promosi dan informasi produk umkm dari industry rumahan. Sehingga diharapkan mampu mengenalkan produk unggulan kepada publik secara luas melalui website.



### 3. Evaluasi SP4N Lapor

SP4N Lapor adalah sebuah Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional untuk menjawab aduan dari masyarakat yang dikoordinir oleh Dinkominfo sebagai leading sektor. Untuk memperjelas organisasi SP4N Lapor, maka dibuatlah SK Tim SP4N Lapor. Setiap tahun, SP4N Lapor selalu dievaluasi oleh Pusat dengan memenuhi data dukung yang diminta.



### 4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Capaian Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan indikator Tingkat Ketersediaan Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi Target 100 % telah tercapai angka 100 % atau 100 % dengan, untuk capaian tahun 2022 dan 2023 seperti tabel berikut :

**Tabel 3.9**  
**Tingkat Kesesuaian Antara Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Statistik**

No	Program /Kegiatan	Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tingkat Ketersediaan Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Program /Kegiatan	Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dalam Satu Data yang memiliki metadata	600	820	136,67 %	1300	1310	100,77 %

Adapun hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan Pada Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral adalah sebagai berikut :

#### 1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Dinkominfo selalu melakukan konsultasi, komunikasi , dan koordinasi dengan BPS dan Bappelitbangda selaku pembina data di Kabupaten Demak untuk mengisi dan data dan metadata di terwujudnya Satu Data Indonesia (SDI). Pembina data, juga melakukan rakor dan admin data di setiap OPD.



- b) Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi

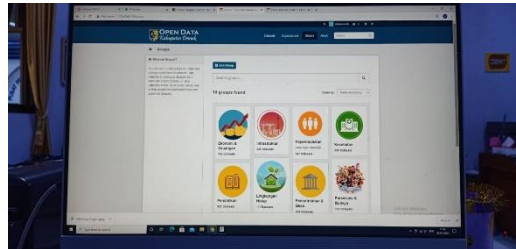
Adanya SOTK Tahun 2017 Dinkominfo Kabupaten Demak merupakan dinas baru di Kabupaten Demak, dan mendapat tugas sebagai Pengelolaan Data Statistik yang merupakan limpahan dari Bappelitbangda Kab. Demak , dan Dinkominfo ditunjuk sebagai Wali Data di Kabupaten Demak, namun belum memiliki SDM yang berkompeten menganalisa data sehingga di tahun 2020 merekrut tenaga kontrak analis data dengan anggaran APBD.



- c) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral

#### 1. Pengelompokan Jenis Data

Untuk Memudahkan Pengolahan data sektoral OPD di Kabupaten Demak, Dinkominfo Kabupaten Demak berupaya untuk mengelompokkan jenis data sektoral OPD Kabupaten Demak menjadi 10 Jenis Data (Ekonomi & Keuangan, Infrastruktur, Kependudukan, Kesehatan, Pendidikan, Lingkungan Hidup, Pemerintahan & Desa, Pariwisata & Budaya, Pertanian dan Sosial).



## 2. Penyeragaman Data dengan Rakor Forum Data

Tahun 2022 Dinkominfo Kabupaten Demak menargetkan data sektoral OPD dan instansi vertical/BUMD sesuai target yang ada, maka semua OPD dan Instansi Vertikal/BUMD di Kabupaten Demak berlomba untuk memberikan data sektoral dan mengupload data ke Aplikasi CKAN dengan berbagai extension baik itu (Excel, CSV).

Oleh karena itu Dinkominfo Kabupaten Demak selalu mengontrol, mengevaluasi dan mengedit data sektoral yang masuk, dan menginformasikan kepada admin OPD untuk mengupload datanya menjadi Excel dan mengganti data sektoral OPD untuk diupload dalam Aplikasi CKAN secara rutin setiap hari.



### d) Membangun Metadata Statistik Sektoral

Penyelesaian Meta Data di Dinkominfo Kab. Demak sebagai Wali Data di Kabupaten Demak yang menerima semua data sektoral OPD dari seluruh OPD Kabupaten Demak dan masih banyak data sektoral yang dikirim tanpa mengisi metadatanya sehingga tidak diketahui identitas dari data yang dikirim tersebut.

Oleh karena itu Dinkominfo Kabupaten Demak menyelenggarakan sosialisasi dan pendampingan pembuatan metadata OPD. Dinkominfo selalu mengontrol, mengevaluasi dan melakukan pendampingan dalam pembuatan metadata di OPD yang belum ada Metadatanya. Serta

menginformasikan untuk up load data dan metadata agar diupload di open data setiap hari minimal 1 atau 2 data.



5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan indicator Tingkat keamanan informasi pemerintah target 70 % realisasi 70 % atau 100 %, seperti tabel :

**Tabel 3.10**  
**Tingkat Kesesuaian Antara Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Persandian**

No	Program /Kegiatan	Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	62,50	66,00	105,60	70 %	70 %	100 %
	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %

Adapun hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan Pada Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Statistik Sektorial adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - a) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Penerapan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya peningkatan kualitas layanan sebagai salah satu realisasi dari tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Corporate Governance*). Dalam penyelenggaraan tata kelola TIK, faktor keamanan informasi merupakan aspek yang sangat penting yang harus diperhatikan, salah satu objek utama tata kelola TIK keamanan informasi menyangkut kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*) dan ketersediaan (*availability*).

Untuk meningkatkan kesadaran pentingnya keamanan informasi, Dinas Kominfo telah menyelenggarakan Pembinaan, pengawasan, pengendalian,

monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kegiatan kepada seluruh OPD di Kabupaten Demak.

Koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Koordinasi dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) pada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait CSIRT Demakkab yang belum berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan SDM Keamanan Siber yang belum ada dan saran prasarana yang belum memadai.



b) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1) Sosialisasi Keamanan Informasi

Sosialisasi bertujuan untuk lebih memahami kepada seluruh pegawai di Pemerintah Kabupaten Demak tentang pentingnya keamanan informasi, guna mendukung implementasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Demak.



2) Pelaksanaan Kegiatan IT Security Assesment

Kegiatan IT Security Assesment (ITSA) adalah kegiatan untuk menguji kelayakan suatu aplikasi dari sisi keamanan informasi, kegiatan ini bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pada kegiatan IT Security Assesment pada 2 (dua) aplikasi tersebut ditemukan celah kerawanan keamanan oleh tim dari BSSN, atas rekomendasi dan temuan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh pengampu sistem elektronik tersebut dengan menutup celah dan meningkatkan keamanan sistem elektronik tersebut.



3) Pelaksanaan Kegiatan Assesment Verifikasi Indeks KAMI oleh BSSN



Untuk menguji layanan keamanan informasi pemerintah daerah, maka seksi persandian melakukan assessment verifikasi indeks KAMI.



## 8 Realisasi Anggaran

### a. Realisasi penggunaan anggaran

Realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam 3 usuan Komifo, urusan statistik dan urusan persandian, sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Untuk melaksanakan program kegiatan sebesar Rp. 8.573.164.066,- terealisasi Rp. 8.386.438.065,- atau 97,82 %. didukung 5 Program antara lain : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Informasi dan Komunikasi Publik, Program Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dan Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi terdiri dari 12 Kegiatan dan 44 sub Kegiatan, secara rinci terlihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.11**  
**Realisasi Anggaran Program Kegiatan**

NO	Program/Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)
		Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (RP)	
<b>Urusan Pemerintah</b>		<b>8.573.164.066</b>	<b>8.386.438.065</b>	<b>97,82</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.334.659.566</b>	<b>6.166.212.100</b>	<b>97,34</b>
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.000.000	15.945.300	99,66
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.687.448.000	3.543.400.239	96,09
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	890.718.166	886.358.608	99,51
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	145.239.000	142.750.255	98,29
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	274.620.400	267.541.000	97,42
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.145.950.000	1.138.387.623	99,34
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.684.000	171.829.075	98,37
<b>URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				
<b>II</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>983.201.700</b>	<b>979.260.500</b>	<b>99,60</b>

NO	Program/Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)
		Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (RP)	
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	983.201.700	979.260.500	99,60
<b>III</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>946.312.000</b>	<b>935.206.946</b>	<b>98,83</b>
1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain diLingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	330.000.000	322.685.000	97,78
2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	616.312.000	612.521.946	99,39
	<b>URUSAN STATISTIK</b>			
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>172.095.800</b>	<b>170.271.000</b>	<b>98,94</b>
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	172.095.800	170.271.000	98,94
	<b>URUSAN PERSANDIAN</b>			
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>136.895.000</b>	<b>135.487.519</b>	<b>98,97</b>
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	136.895.000	135.487.519	98,97

#### b. Realisasi IKU

Evaluasi Kinerja telah dilakukan perhitungan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kinerja sasaran dalam upaya :

1. Meningkatnya kinerja pelayanan publik pemerintahan daerah ( indeks kepuasan masyarakat (ikm) daerah)
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (nlai sakip daerah)

Komitmen Pemerintah Kabupaten Demak dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan Informatika, urusan statistik dan urusan persandian di tahun 2023 didukung oleh :

1. Ketersediaan infrastruktur Teknologi informasi yang memadai.
2. Ketersediaan tenaga programmer yang handal sehingga sangat mendukung dalam pembangunan aplikasi layanan publik di Pemerintah Kabupaten Demak
3. Perkembangan digitalisasi TIK sangat pesat sehingga masyarakat dapat mengakses teknologi secara langsung, baik melalui perangkat Handphone ataupun perangkat lainnya.



Berdasarkan indikator Tujuan terdapat 3 (indicator) dan terdapat 5 (lima) indikator sasaran menjadi IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak kurun waktu 2021 - 2025, secara keseluruhan untuk sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak di tahun 2023 BERHASIL dengan KINERJA SANGAT BAIK. Adapun capaian sbb :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Komunikasi dan Informatika target 90,26 realisasi 90,26 capaian 100 %
2. Persentase keluhanmasyarakat yang ditindaklanjuti target 100 % realisasi 100 % capaian 100 %
3. Nilai SAKIP Dinas komunikasi dan Informatika target 83,04 realisasi 83,46 capaian 100,51 %
4. Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang mencapai target 100 % realisasi 100 % capaian 100 %
5. Indeks SPBE target % 3,24 realisasi 4,80 capaian 148,15 %
6. Indeks Layanan SPBE target 3,87 realisasi 5,00 capaian 129,20
7. Indeks Keamanan Informasi target 2,20 realisasi 2,50 capaian 113,64 %
8. Indeks tata kelola SPBE target 3,15 realisasi 4,73 capaian 150,16

**Tabel 3.10**  
**Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2023			KRITERIA PENILAIAN
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Komunikasi dan Informatika	90,26	90,26	100	Sangat Tinggi
Persentase keluhanmasyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100	Sangat Tinggi
Nilai SAKIP Dinas komunikasi dan Informatika	83,04	83,46	100,51	Sangat Tinggi
Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang mencapai target	100 %	100 %	100	Sangat Tinggi
Indeks SPBE	3,24	4,80	148,15	Sangat Tinggi
Indeks Layanan SPBE	3,87	5,00	129,20	Sangat Tinggi
Indeks Keamanan Informasi	2,20	2,50	113,64	Sangat Tinggi
Indeks tata kelola SPBE	3,15	4,73	150,16	Sangat Tinggi

**c. Realisasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan**

Berdasarkan 5 indikator program, 28 indikator kegiatan dan 44 indikator sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak tahun 2023, secara keseluruhan rata-rata mencapai target katagori BERHASIL dengan KINERJA SANGAT BAIK. Capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan terinci sbb :

**Tabel 3.12**  
**Realisasi capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program Kegiatan dan sub Kegiatan	Targe t	Satuan	Realisa si	Capaian Kinerja
<b>URUSAN KOMINFO</b>					
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	100	%	<b>100</b>	<b>100</b>
	Persentase Pelayanan sesuai Standar Pelayanan	100	%	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah</b>	<b>9</b>	<b>doku men</b>	<b>13</b>	<b>144,44</b>
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2	doku men	2	<b>100</b>
<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD</i>	2	doku men	4	<b>200</b>
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	3	Lapor an	3	<b>100</b>
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	72	Doku men	72	100
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	28	Oran g/bul an	28	<b>100</b>
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	44	Doku men	44	<b>100</b>
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	<b>100</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	2130	Oran g	2190	103
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	70	<b>Paket</b>	<b>70</b>	<b>100</b>
<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	60	<b>Oran g</b>	<b>60</b>	<b>100</b>
<i>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	2000	Oran g	2060	<b>103,00</b>

<b>Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Program Kegiatan dan sub Kegiatan</b>	<b>Targe t</b>	<b>Satua n</b>	<b>Realisa si</b>	<b>Capaian Kinerja</b>
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	114	Paket	123	108
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	4	Paket	4	<b>100</b>
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12	Paket	14	<b>117</b>
<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	4	Paket	5	<b>125</b>
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12	Paket	11	<b>92</b>
<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	4	Laporan	4	<b>100</b>
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	75	Laporan	80	<b>107</b>
	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	3	Dokumen	5	<b>167</b>
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang disediakan	10	Unit	75	750
<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	1	Unit	1	<b>100</b>
<i>Pengadaan Mebel</i>	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	3	Unit	68	<b>2267</b>
<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	6	Unit	6	<b>100</b>
<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya</i>	0		0	<b>0</b>
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Yang Tersedia	11	Laporan	11	100
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	7	Laporan	7	<b>100</b>
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	4	Laporan	4	<b>100</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah BMD yang terpelihara	58	Unit	141	243
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	1	unit	1	<b>100</b>
<i>Pemeliharaan Mebel</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	13	unit	13	<b>100</b>
<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	15	unit	15	<b>100</b>

<b>Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Program Kegiatan dan sub Kegiatan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian Kinerja</b>
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	15	unit	98	<b>653</b>
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	3	unit	3	<b>100</b>
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	10	unit	10	<b>100</b>
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	1	unit	1	<b>100</b>
<b>Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik</b>	<b>Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Tingkat Jawa Tengah</b>	<b>98,80</b>	Angka	<b>98,56</b>	<b>99,76</b>
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komunikasi dan informasi publik yang dikelola	5	Layanan	5	100
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik</i>	4	Dokumen	4	<b>100</b>
Pelayanan Informasi Publik	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik</i>	3	Dokumen	4	<b>133.33</b>
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah</i>	2	Dokumen	4	<b>200</b>
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	<i>Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan</i>	4	Dokumen	4	<b>100</b>
<b>Program pengelolaan aplikasi informatika</b>	<b>persentase aplikasi e- gov yang terintegrasi dengan portal daerah</b>	<b>59,52</b>	%	<b>64,28</b>	<b>108</b>
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah	41	OPD	41	100
<i>Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i>	1	Unit	1	<b>100</b>
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi yang telah terintegrasi	2	Unit	4	200
<i>Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas</i>	<i>Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan</i>	25	unit	29	<b>116,00</b>

<b>Program Kegiatan dan Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Program Kegiatan dan sub Kegiatan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian Kinerja</b>
<i>Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City</i>	1	Dokumen	3	<b>300</b>
<i>Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)</i>	<i>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah</i>	1	Dokumen	4	<b>400</b>
<i>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE</i>	<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)</i>	2	Dokumen	3	<b>175</b>
<i>Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas</i>	<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE</i>	1	Dokumen	2	<b>200</b>
<b>URUSAN STATISTIK</b>					
<b>Program penyelenggaraan statistik sektoral</b>	<b>Tingkat Ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi</b>	100	%	<b>100</b>	<b>100</b>
Penyelenggaraan Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dalam Satu Data yang memiliki metadata	1300	Data	1310	100,77
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Sektoral</i>	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</i>	2	Dokumen	4	<b>100</b>
<i>Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Daerah yang Terintegrasi</i>	<i>Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi</i>	41	Orang	41	<b>100</b>
<i>Membangun Metadata Statistik Sektoral</i>	<i>Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun</i>	1300	Metadata	<b>1310</b>	<b>100,77</b>
<i>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sektoral</i>	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS</i>	41	OPD	41	<b>100</b>
<b>URUSAN PERSANDIAN</b>					
<b>Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi</b>	<b>Tingkat keamanan informasi pemerintah</b>	<b>70,00</b>	%	<b>70,00</b>	<b>100</b>
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	1	Laporan	4	400
<i>Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</i>	3	Laporan	3	<b>100</b>
<i>Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi</i>	41	OPD	41	<b>100</b>

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.

Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika. Adapun fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu Terwujudnya peningkatan kinerja pelayanan publik Pemerintahan Daerah untuk mendukung focus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan., tersedianya akses pita lebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan., Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman., Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak yang dihasilkan di tahun 2023 berdasarkan sasaran strategis pemerintahan daerah Kabupate Demak :

- 1. *Meningkatnya kinerja pelayanan publik pemerintahan daerah***
- 2. *Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah***

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak tahun 2023 telah dilaksanakan untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat digambarkan melalui indikator sebagai berku:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Komunikasi dan Informatika target 90,26 realisasi 90,26 capaian 100 %
2. Persentase keluhanmasyarakat yang ditindaklanjuti target 100 % realisasi 100 % capaian 100 %



3. Nilai SAKIP Dinas komunikasi dan Informatika target 83,04 realisasi 83,46 capaian 100,51 %
4. Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang mencapai target 100 % realisasi 100 % capaian 100 %
5. Indeks SPBE target % 3,24 realisasi 4,80 capaian 148,15 %
6. Indeks Layanan SPBE target 3,87 realisasi 5,00 capaian 129,20
7. Indeks Keamanan Informasi target 2,20 realisasi 2,50 capaian 113,64 %
8. Indeks tata kelola SPBE target 3,15 realisasi 4,73 capaian 150,16

Di luar indikator sasaran strategis diatas, pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak ditunjukkan dengan beberapa penghargaan yang diperoleh, antara lain :

1. Top Digital Implementation 2023 # Stars 4 (IT Wards Top Digital Awards Tingkat Nasional)
2. Top Leader On Digital Implementation 2023 (IT Wards Top Digital Awards Tingkat Nasional)
3. Program Smart City Katogori Program Kolaborasi pada Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional
4. LPPL Terbaik 2 Tingkat Jawa Tengah
5. Kabupaten Informatif (Tingkat Jawa Tengah)

#### **4.2. SARAN**

Guna meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika di masa mendatang diperlukan strategi-strategi terukur antara lain :

1. Peningkatan keamanan Informasi dan bekerjasama dengan BSSN tentang IT Security Assesment
2. Memperluas Integrasi Layanan Publik dan kelembagaan dan Penguatan jaringan internet/intranet, komunikasi publik melalui media sosial dan media massa;
3. Mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
4. Pengembangan Pusat Data Demak menuju Satu Data Demak
5. Meningkatkan persentase aplikasi e-gov yang terintegrasi dengan portal daerah agar pengelolaan komunikasi publik dapat efektif dan terorganisir;
6. Melakukan koordinasi dengan Dinkominfo Provinsi Jateng sebagai leading sector tentang regulasi KIM;
7. Melakukan evaluasi bulanan, triwulanan, dan tahunan terhadap pelaksanaan program kegiatan.

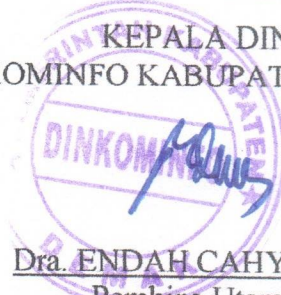
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak dibuat sebagai laporan kinerja dan



pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Demak. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang. Sekian dan terima kasih.

Demak, 3 Januari 2024

KEPALA DINAS  
KOMINFO KABUPATEN DEMAK



Dra. ENDAH CAHYA RINI, MM  
Pembina Utama Muda

NIP. 19680903 199302 2 001